KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA

LAPORAN KINERJA 2019

BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng
Jakarta Pusat 10310

PENGANTAR

Salah satu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan adalah melalui Laporan Kinerja yang disampaikan secara periodik.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama menyusun Laporan Kinerja yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019.

Sepanjang tahun 2019, Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran dimana pengukuran kinerjanya diterjemahkan dalam bentuk perjanjian kinerja. Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan menjadi landasan pacu untuk perbaikan-perbaikan kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama di tahun-tahun yang akan datang.

Jakarta, 2019
Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama



Dr. Esrom Hamonangan P,S.Si.,MEE

DAFTAR ISI

PENGANTAR ____ i
DAFTAR ISI ____ ii
DAFTAR TABEL ____ iii
DAFTAR GAMBAR ____ iii

BAGIAN SATU PENDAHULUAN ____ 1

Latar Belakang ____ 1
Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi ____ 2
Peran Strategis ____ 4
SIstematika Pelaporan ____ 5

BAGIAN DUA PERENCANAAN KINERJA ____ 7

Rencana Strategis ____ 7
Rencana Kerja ____ 11
Perjanjian Kinerja ____ 13

BAGIAN TIGA AKUNTABILITAS KINERJA ____ 14

Capaian Kinerja ____ 14
Kinerja-Kinerja Lainnya ____ 17
Penganggaran ____ 34

BAGIAN EMPAT PENUTUP ____ 35

Perbaikan Berkesinambungan ____ 35

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL & GAMBAR

Tabel 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Komnas HAM 7

Tabel 2. Perubahan Indikator Kinerja Utama 8

Tabel 3. Rencana Kerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama 2019 12

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama 2019 14

Tabel 5. Nilai Akuntabilitas Komnas HAM 2018-2019 15

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal 2019 17

Tabel 7. Laporan Pengawasan Internal tahun 2019 23

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Bagian Kerja sama, Persidangan dan TU Pimpinan 27

Tabel 9. Kegiatan Konferensi Pers dan Diskusi Media Komnas HAM 2019 27

Tabel 10. Pagu Anggaran 2019 Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama 34

Tabel 11. Realisasi Anggaran 2019 Per Output 34

Gambar 1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) 2

Gambar 2.Struktur Organisasi Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama 3

Gambar 3. Peran Strategis Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama 4

Gambar 4. Alur Penyusunan Laporan Kinerja 6

Gambar 5. Penandatanganan Perjanjian Kinerja 13

Gambar 6. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama 13

Gambar 7.Proses Penyusunan Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024 18

Gambar 8. Launching Laptah 2018 19

Gambar 9.Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Komnas HAM Tahun 2019 20

Gambar 10. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Komnas HAM Tahun 2015-2019 21

Gambar 11. Ketua Komnas HAM memberikan keterangan pers 29

Gambar 12. Penyelenggaraan Sidang dan Rapat 31

Gambar 13. Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Universitas Syiah Kuala, Aceh 32

Gambar 14. Ketua Komnas HAM sebagai pembicara pada Konfererensi Internasional Ke-III tentang Perlindungan HAM di Eurasia, Moskow, Rusia 33

Gambar 15. Arti Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 35

BAGIAN I
PENDAHULUAN

BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA

BAGIAN SATU

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

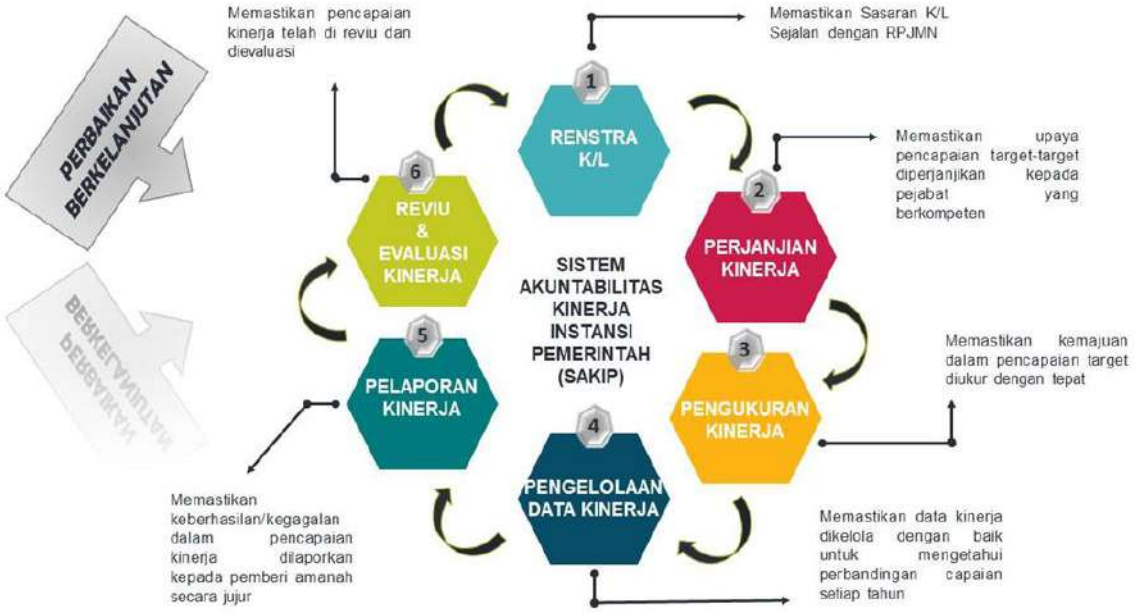
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001 (Kepres No.48/2001) tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah dasar pembentukan struktur organisasi pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM. Pasal 5 dalam ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Setjen Komnas HAM mempunyai tugas memimpin Sekretariat Jenderal Komnas HAM sesuai dengan tugasnya, membina seluruh organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM agar berdaya guna dan berhasil guna, menentukan kebijaksanaan teknis pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal Komnas HAM, serta membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan instansi/lembaga lain di luar Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya Sesjen Komnas HAM dibantu oleh sebanyak-banyaknya 5 (lima) biro. Masing-masing biro terdiri sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian dimana setiap bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian. Sebagai salah satu unit kerja setingkat Eselon II, Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengawasan internal, koordinasi dan administrasi Kerja sama dan tata usaha pimpinan.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja ini bertujuan untuk memberikan informasi atas kinerja yang telah dan seharusnya di capai serta sebagai dasar perbaikan berkesinambungan guna meningkatkan kinerja di Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama.

Hal terpenting dalam pelaporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan/ penjelasan secara memadai hasil analisa terhadap pengukuran kinerja

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 (PP No.8/2006) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 (Perpres No.29/2014) tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 (Permenpan RB No.53/2014) tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Gambar 1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP)

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 (Persesjen Komnas HAM No.002/2015) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal Komnas HAM terdiri dari 4 (empat) biro dan salah satu diantaranya adalah Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja sama yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengawasan internal, koordinasi dan administrasi kerja sama dan tata usaha pimpinan.

Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja sama menyelenggarakan fungsi:

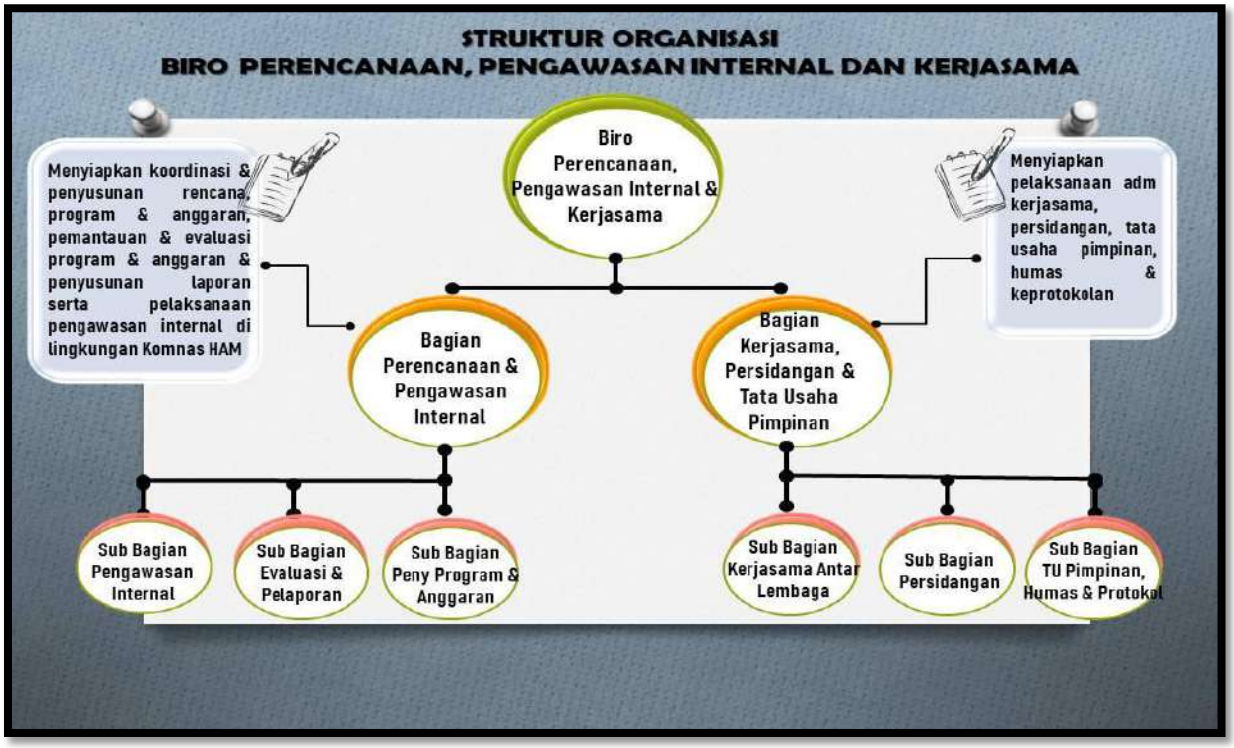
a. Koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran;
b. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
c. Pemantauan dan evaluasi program dan anggaran serta penyusunan laporan;
d. Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Setjen Komnas HAM;
e. Pelaksanaan administrasi kerja sama, persidangan, tata usaha pimpinan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan.

Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja sama terdiri dari :

a. Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal, menyelenggarakan fungsi :
   - ♦ Penyiapan bahan koordinasi pelaksanan rencana, program dan anggaran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
   - ♦ Penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
   - ♦ Penyiapan pemantauan dan evaluasi program dan anggaran serta penyusunan laporan;
   - ♦ Penyiapan dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Setjen Komnas HAM; dan
   - ♦ Penyusunan laporan hasil pengawasan.

b. Bagian Kerja sama, Persidangan, Tata Usaha Pimpinan, menyelenggarakan fungsi:
   - ♦ Penyiapan administrasi Kerja sama antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di dalam dan di luar negeri;
   - ♦ Penyiapan pelaksanaan persidangan dan risalah hasil persidangan Komnas HAM; dan
   - ♦ Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan

c. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.Struktur Organisasi Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama

PERAN STRATEGIS

Sebagai unit organisasi setingkat Eselon II, Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengawasan internal, koordinasi dan administrasi kerja sama dan tata usaha pimpinan, memiliki 2 (dua) peran strategis dalam mendukung terwujudnya sasaran strategis lembaga.

Peran supervisi yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal serta peran supporting oleh Bagian Kerja sama, Persidangan dan Tata Usaha Pimpinan. Selain berkontribusi dalam capaian sasaran strategis, kedua peran strategis ini juga mendukung terwujudnya Isu Strategis Lembaga yaitu : Penguatan Kelembagaan.



Gambar 3. Peran Strategis Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama

SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama, adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan aspek tugas dan fungsi serta peran strategis organisasi pada tingkat kelembagaan.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan yang dimulai dengan penjelasan Renstra Komnas HAM Tahun 2015-2019 khususnya untuk sasaran strategis dan indikator yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama dilanjutkan dengan penjelasan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan penjelasan penetapan/perjanjian kinerja tahun 2019.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
b. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
c. Kinerja Lain-Lain Pada sub bab ini diuraikan kinerja lainnya pada tahun yang bersangkutan meliputi kinerja dalam inovasi manajemen/pelayanan dan capaian lainnya.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama Tahun 2019 meliputi Perjanjian Kinerja Tahun 2019.



Gambar 4. Alur Penyusunan Laporan Kinerja

BAGIAN II

PERENCANAAN KINERJA

BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA

BAGIAN DUA

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM adalah dokumen perencanaan Komnas HAM untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2015 sampai dengan 2019, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dengan periode yang sama. Renstra Komnas HAM ditetapkan melalui Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 001A/Ketua.SK/III/2015 pada Maret 2015.

Tabel 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Komnas HAM

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya Komnas HAM sebagai katalisator dalam pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM serta perlindungan kelompok marginal dan rentan	1. Mempercepat dan memastikan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM yang berat	1. Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, khususnya pelangggaran HAM yang berat	1. Terselesaikannya kasus pelanggaran HAM yang berat
			2. Meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM
			3. Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan
	2. Mempercepat dan memastikan peningkaan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM dalam kehidupan kelompok marginal dan rentan	2. Meningkatkan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM serta rekomendasi perlindungan untuk kelompok marginal dan rentan; antara lain perempuan,	1. Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang - undangan yang

		anak, penyandang cacat, manusia lanjut usia, napi/tahanan, masyarakat adat, orang dengan masalah kejiwaan, kelompok minoritas pengungsi dalam negeri *(IDP's)*	berprespektif HAM
			2. Terwujudnya instrumen standar pelaksanaan HAM (HRI)
			3. Meningkatnya pemahaman HAM Aparatur Negara dan Masyarakat Indonesia
	3. Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan professional dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya	3. Mewujudkan *good governance*	1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas lembaga melalui *electronic government*
			2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas HAM (penilaian RB)

Guna meningkatkan akuntabilitas kinerja, Komnas HAM melakukan perbaikan dan penyesuaian indikator kinerja utama pada Desember 2019 sesuai dengan Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor. 019/Komnas HAM/XII/2019 tentang Penetepan Perbaikan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Komnas HAM. Penyesuaian dilakukan agar indikator kinerja utama dapat mencerminkan kinerja lembaga yang SMART.

Tabel 2. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Deskripsi Pengukuran	Alasan Memilih
1	Terselesaikan kasus pelanggaran HAM yang berat	Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan	Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang ditandatangani berdasarkan mandat undang-undang	Mandat UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM

2	Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan	Persentase opini atas dugaan pelanggaran HAM sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan Majelis Hakim	Target atau realisasi Jumlah Opini atas dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan Komnas HAM dalam pengadilan. =……x 100% Jumlah opini atas dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan Komnas HAM dalam pengadilan Capaian = Realisasi / Target x 100%	Mandat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
		Jumlah Hasil penanganan sengketa HAM melalui mediasi	Target atau realsasi Jumlah hasil kesepakatan mediasi sengketa HAM =……x100% Jumlah rekomendasi hasil mediasi sengketa HAM Capaian = Realisasi / Target x 100%	Mandat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3	Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok mengenai marginal dan rentan	Jumlah kebijakan dibentuk/diubah/ dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM	Target atau realisasi Jumlah Kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalakan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM =……x100% Jumlah Kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalakan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM Capaian = Realisasi / Target x 100%	Mandat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

		Persentase instrument HAM yang diaksesi/ratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM	Target atau realisasi Jumlah instrument HAM yang diaksesi/ratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM =……x100% Jumlah instrument HAM yang diaksesi/ratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM Capaian = Realisasi / Target x 100%	Mandat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4	Terwujudnya instrument standar pelaksanaan HAM	Persentase Indeks HAM yang diimplementasi oleh Kementrian/ Lembaga	Target atau realisasi Jumlah Indeks HAM yang diimplementasi oleh Kementrian/Lembaga =……x100% Jumlah indeks HAM yang telah dihasilkan. Capaian = Realisasi / Target x 100%	Mandat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5	Meningkatnya pemahaman HAM aparatur Negara dan masyarakat	Jumlah K/L/D/Stakeholder yang mengimplementasi kurikulum HAM	Target atau realisasi Jumlah K/L/D/Stakeholder yang mengimplementasi kurikulum HAM =…… x100% Jumlah K/L/D/Stakeholder yang mengimplementasi kurikulum HAM Capaian = Realisasi / Target x 100%	Mandat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
		Jumlah kebijakan dibentuk/diubah/ dibatalkan berdasarkan diseminasi		
6	Terwujudnya reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas HAM	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi dan Kemenpan	Mandat Peraturan Ketua Komnas HAM No.001A/KETUA.SK/III/2015 tentang
		2. Nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi	Nilai evaluasi dari Kemenpan RB	

		3. Opini Laporan Keuangan	Opini atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	Renstra Komnas HAM 2015-2019

Pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama merupakan gambaran pentingnya peran unit ini dalam mewujudkan **sasaran strategis ke-enam** pada Renstra Komnas HAM, yaitu :

Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Penataan Kelembagaan Komnas HAM

RENCANA KERJA

Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. Renja K/L merupakan penjabaran dari Renstra K/L yang memuat kebijakan, program, kegiatan, keluaran (*output*), dan lokasi sampai dengan kabupaten/kota.

Renja Komnas HAM disusun dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan semua lini, dari tingkat Pimpinan Lembaga sampai dengan Pelaksana Tekhnis serta berorientasi pada perbaikan perencanaan Komnas HAM. Penyusunan Renja Komnas HAM tahun 2019 telah dimulai di tahun 2018, diawali dengan diselenggarakannya kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan (Rakornas Perencanaan) yang diinisiasi oleh Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama. Peserta dalam kegiatan ini tidak hanya dari Kantor Pusat Jakarta, namun juga menghadirkan 6 (enam) Kantor Perwakilan Komnas HAM di daerah yakni Aceh, Sumatera Barat, Maluku, Kalimantan Barat, Palu, dan Papua. Kegiatan ini juga mengundang pembicara dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN RB. Rakornas Perencanaan dilaksanakan sebagai forum koordinasi perencanaan dalam rangka penetapan usulan kegiatan, target kinerja dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran stategis lembaga. Hasil Rakornas Perencanaan menjadi bahan untuk persiapan *Bilateral dan Trilateral Meeting*.

Renja Komnas HAM tahun 2019 terdiri dari 3 tingkatan yaitu Renja pada tingkatan Lembaga, Renja pada tingkatan Program dan Renja pada tingkatan Kegiatan. Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama berada pada tingkatan kegiatan dimana sasaran dan indikator kegiatannya merupakan tahapan dalam mencapai Sasaran Strategis ke-6 sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Renstra Komnas HAM.

Tabel 3. Rencana Kerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama 2019

Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sasaran Program : Terselenggaranya dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM
Kegiatan : 3335. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama
Unit Organisasi : Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM
Indikator Kinerja : Nilai Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM

Kode	Sasaran Kegiatan/Output/Komponen	Vol/ Target	Satuan	Alokasi Anggaran
01	**Meningkatkannya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Komnas HAM**			**5.419.212.000**
01.952	Layanan Perencanaan	1	Layanan	1.392.878.000
01.952.051	Penyusunan rencana kerja	8	Dokumen	1.392.878.000
01.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Layanan	881.460.000
01.953.051	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	3	Dokumen	676.450.000
01.953.070	Penyusunan laporan	2	Laporan	205.010.000
01.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan	2.307.733.000
01.958.051	Hubungan masyarakat	12	Dokumen	1.250.000.000
01.958.052	Kampanye/edukasi publik	2	Laporan	387.940.000
01.958.053	Penyusunan Laporan	2	Laporan	669.793.000
01.965	Layanan Protokoler	1	Layanan	194.467.000
01.959.052	Pelaksanaan keprotokoleran	1	Layanan	194.467.000
01.965	Layanan Audit Internal	1	Layanan	642.674.000
01.965.051	Pelaksanaan Audit Internal	10	Dokumen	308.560.000
01.965.054	Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaaan LHP	2	Laporan	90.375.000
01.965.055	Reviu perencanaan anggaran	8	Laporan	185.508.000
01.965.056	Pembinaan pengawasan kinerja dan keuangan	2	Laporan	58.231.000
Total				**5.419.212.000**

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Perpres No. 29/2014 dan Permenpan RB No. 53/2014. Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Eselon II merupakan perjanjian antara Eselon I dengan Eselon II yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 tahun untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Tahun 2019, Komnas HAM telah menyusun Perjanjian Kinerja sampai dengan Eselon IV, begitupula hal nya dengan Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama



Gambar 5. Penandatanganan Perjanjian Kinerja



Gambar 6. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama

BAGIAN III

AKUNTABILITAS KINERJA

BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA

BAGIAN TIGA

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM	Nilai Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM	1 Layanan (B)	1 Layanan (B)

Salah satu indikator kinerja untuk menilai capaian sasaran strategis ini adalah ***Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (Kementerian PANRB).*** Pada tahun 2019 hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Komnas HAM mendapatkan nilai 62,19 dengan predikat "B"(baik). Bila dibandingkan dengan tahun 2018, hasil evaluasi menunjukkan peningkatan sebesar 2 point dari 60,19 menjadi 62,1

Tabel 5. Nilai Akuntabilitas Komnas HAM 2018-2019

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	2018	2019
1	Perencanaan Kinerja	30	18,05	18,45
2	Pengukuran Kinerja	25	15,05	15,21
3	Pelaporan Kinerja	25	9,03	9,65
4	Evaluasi Internal	10	6,02	6,43
5	Capaian Kinerja	20	12,04	12,45
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**60,19**	**62,19**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**

Pada tahun 2019, Komnas HAM telah melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi Kementerian PANRB tahun 2018 sebagai berikut :

1. Komnas HAM telah menyusun Peta Kinerja (*cascading*) untuk menggambarkan hubungan/turunan kinerja dan telah menyampaikan ke Kementerian PANRB, sebagai barang bukti pendukung pada area akuntabilitas RB Komnas HAM. Pada tahun 2019, Komnas HAM telah merevisi IKU untuk mendukung peningkatan kinerja lembaga.
2. Komnas HAM telah menyusun dan mengesahkan Perjanjian Kinerja sampai tingkat unit kerja terkecil (Eselon IV) pada April 2019. Keterlambatan penandatanganan Perjanjian Kinerja tahun 2019 yang seharusnya dilakukan pada awal tahun ini disebabkan adanya restrukturisasi jabatan pada Januari 2019, termasuk pengangkatan Pejabat Eselon II di Komnas HAM.
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Komnas HAM telah melalui tahapan-tahapan sinkronisasi baik di internal Komnas HAM melalui kegiatan Rakornas Program dan Anggaran Tahun 2019 maupun proses Trilateral Meeting bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan/DJA. Proses penelahaan perencanaan anggaran baik internal maupun eksternal bersama mitra kerja Komnas HAM, dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan Anggaran Berbasis Kinerja.
4. Mekanisme monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari identifikasi atas permasalahan capaian kinerja telah dilakukan secara berkala baik bulanan maupun triwulanan yang disampaikan oleh unit kerja sesuai format kertas kerja monitoing dan evaluasi. Informasi perkembangan capaian kinerja disampaikan melalui rapat koordinasi di tingkat manajemen yang dilaksanakan setiap awal bulan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk peringatan dini kepada unit kerja agar lebih fokus untuk mencari alternatif terbaik sebagai solusi atas permasalahan yang telah teridentifikasi. Melalui mekanisme monitoring dan evaluasi berkala ini menghasilkan peningkatan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Komnas HAM dari 60,46 di tahun 2018 menjadi 95,10 di tahun 2019.

5. Peningkatan kapasitas SDM yang mengelola SAKIP dilakukan dengan berbagai metode. Bimbingan tekhnis dengan mengundang narasumber maupun studi banding ke Instansi yang telah memiliki predikat SAKIP "A".

Kementerian PANRB memberikan beberapa catatan penting sebagai Hasil evaluasi atas Nilai Akuntabilitas Komnas HAM tahun 2019 berdasarkan surat dari Kementerian PANRB Nomor B/126/AA.05/2019 yaitu :

1. Beberapa rekomendasi tahun sebelumnya belum ditindaklanjuti, sehingga belum terdapat kemajuan yang signifikan dalam penerapan SAKIP di lingkungan Komnas HAM
2. Hal yang masih perlu mendatkan perhatian guna peningkatan akuntabilitas kinerja antara lain :
   a. Kualitas tujuan dan sasaran dalam renstra belum sepenuhnya berorientasi hasil (*outcome*) dan dilengkapi dengan indicator kinerja yang SMART.
   b. Kualitas penjabaran *(cascading)* belum dijabarkan dengan baik dan Komnas HAM belum memanfaatkan aplikasi e-kinerja sebagai alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi
   c. Pemanfaatann *e-perfomance* belum optimal
   d. Laporan Kinerja belum menyajikan analisis pencapaian kinerja yang berorientasi hasil, perbandingan data kinerja, menyajikan informasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja
   e. Beberapa rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal belum di tindaklanjuti oleh pimpinan unt kerja untuk meningkatkan budaya kinerja tinggi.

Kementerian PANRB memberikan rekomendasi untuk tahun mendatang, yaitu :

1. Renstra Komnas HAM tahun 2020- 2024 harus menyajikan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART.
2. Meningkatkan kualitas *cascading* untuk , menyusun Perjanjian Kinerja (PK) yang dijadikan dasar pemberian *reward and punishment.*
3. Mengoptimalkan *e-perfomance* sebagai media monitoring dan evaluasi, serta mengintegrasikan system perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja agar mempercepat penerapan *performance based budgeting.*
4. Pimpinan unit kerja agar memanfaatkan laporan kinerja sebagai *feedback* dalam perbaikan yang akan datang
5. Meningkatkan kualitas evaluasi AKIP unit kerja agar mempu mendorong perbaikan dalam implementasi SAKIP unit kerja secara signifikan.
6. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP.

Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas internal dilaksanakan sebagai bentuk upaya pemberian *feedback* terhadap pencapaian kinerja sehingga capaian kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin dicapai sesuai Perjanjian Kinerja. Pelaksanaan evaluasi periodik dilaksanakan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta keberhasilan program. Dalam pelaksananaan evaluasi ini membahas bagaimana capaian atau keberhasilan pelaksanaan program yang menunjang nilai akuntabilitas Setjen Komnas HAM.

KINERJA-KINERJA LAINNYA

Perjanjian Kinerja Komnas HAM sejak tahun 2018 hingga 2019 disusun sampai pada tingkat Eselon IV. Dalam laporan kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama ini menjelaskan capaian-capaian perjanjian kinerja sampai pada tingkat Eselon III yang juga dapat menggambarkan keberhasilan pada tingkat Eselon IV.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Terselenggaranya layanan perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan tepat waktu	8 Dokumen	8 Dokumen
2.	Terselenggaranya layanan pemantauan dan evaluasi	Nilai MENPAN atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	B Nilai	B Nilai
3.	Terselenggaranya layanan audit internal	Layanan Audit Internal yang tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan

Dokumen Perencanaan yang dihasilkan tepat waktu. Dokumen perencanaan menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP, terbagi menjadi dokumen periode 5 (lima) tahunan dikenal dengan dokumen Rencana Strategis dan periode tahunan dikenal dengan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.

Seiring dengan berakhirnya Rencana Strategis Komnas HAM 2015-2019, Komnas HAM melalui Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama mulai menyusun Rencana Strategis 2020-2024.



Gambar 7.Proses Penyusunan Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024

Pada 2019, mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Kementerian PANRB, Komnas HAM telah melewati 3 (tiga) tahapan penyusunan renstra, yaitu : (1) penyusunan rancangan teknokratik; (2) penyusunan rancangan Renstra; dan (3) penelaahan rancangan Renstra dengan Bappenas RI, proses selanjutnya dalam penyusunan Renstra ini akan dilakukan pada 2020 yang diakhiri dengan penetapan Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024. Diharapkan Renstra yang baru tersebut dapat menjawab catatan-catatan minor yang diberikan Kementerian PANRB pada evaluasi atas akuntabilitas kinerja Komnas HAM selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Selain penyusunan dokumen Rencana Stretegis, Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama juga berhasil menyelesaikan beberapa dokumen perencanaan lainnya yang diharapkan dapat meningkatkan akuntabiulitas kinerja Komnas HAM, yaitu: **(1) Dokumen Kerangka Pendanaan Jangka Menengah 2020; (2) Dokumen Perjanjian Kinerja 2019; (3)Dokumen Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting); (4) Dokumen Rencana Kerja 2020; (5) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 2020; (6) Petunjuk Operasional Kegiatan 2019.**

Selain itu, Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama juga dalam tahap penyelesaian penyusunan **Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Komnas HAM**.

Nilai Menpan atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantuan dan evaluasi. Pemantuan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat di ambil tindakan sedini mungkin, sedangkan Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana standar. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) dari pelaksanaan rencana pembangunan.

Untuk mendukung capaian indikator kinerja ke-dua dalam Perjanjian Kinerja Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal, terdapat 3 (tiga) Dokumen Akuntabilitas Kinerja yang dihasilkan yaitu :

1. **Laporan Kinerja Komnas HAM tahun 2018 (LKIP)**

   Perpres No. 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja dalam hal ini Kementerian/Lembaga, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan baik bersumber dari rupiah murni (APBN) maupun hibah. Sebagai salah satu entitas dimana penganggarannya di dukung oleh APBN dan hibah Komnas HAM berkewajiban menyusun Laporan Kinerja. Biro Perencanaan Pengawasan Internal dan Kerja sama bertugas untuk menyusun Laporan Kinerja Komnas HAM. Disamping Laporan Kinerja lembaga, setiap unit eselon II di Komnas HAM wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja setiap Biro kepada Biro Perencanaan Pengawasan Internal dan Kerja sama yang bertugas untuk meneruskan laporan tersebut pada Kemenpan RB melalui website *esr.menpan.go.id.*

   Hasil nilai evaluasi akuntabilitas Komnsa HAM di 2018 adalah 60,19 dengan predikat Baik (B). Dalam hal ini nilai akuntabilitas Komnas HAM mengalami peningkatan sebesar 4,33 yang semula 55,86 dengan predikat CC pada tahun 2017. Kemudian di tahun 2019, Nilai hasil evaluasi akuntabilitas Komnas HAM kembali meningkat menjadi 62,19 dengan predikat Baik (B).

2. **Laporan Tahunan tahun 2018 (LAPTAH)**

   Pasal 97 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, mewajibkan Komnas HAM menyampaikan Laporan Tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada DPR, dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung (MA). Laporan Tahunan Komnas HAM tahun 2019 di *launching* pada 7 Agustus 2019, dengan menghadirkan tokoh-tokoh hak asasi manusia serta berbagai kementerian dan lembaga. Laporan Tahunan Komnas HAM 2019 mengusung tema sekaligus yaitu “Pelanggaran HAM Berat Masalalu, Konflik Agraria, Intoleransi dan Radikalisme serta Peningkatan Tata Kelola Kelembagaan Komnas HAM” dan “Seperempat Abad Komnas HAM”



Gambar 8. Launching Laptah 2018

3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran 2019

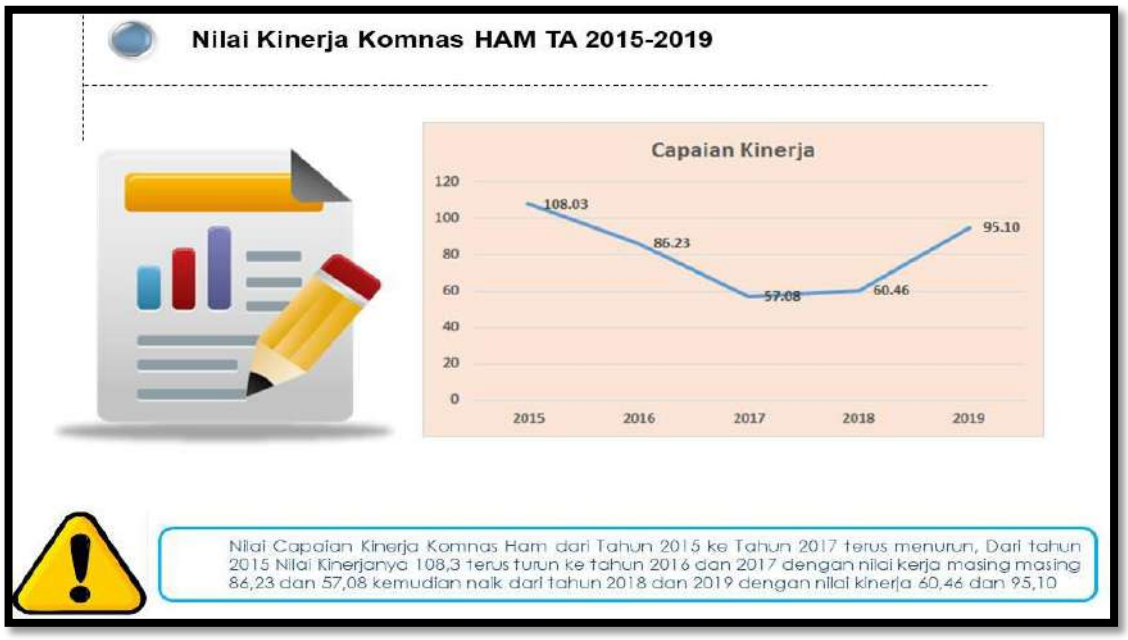
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran tahun 2019 didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 (PP No.39/2006) tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 /PMK.02/2017 (PMK No.214/2017) tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) memiliki 2 (dua) fungsi yakni fungsi akuntabilitas sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap penggunaan anggaran dan fungsi peningkatan kualitas untuk mengukur efektifitas dan efisiensi serta identifikasi faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan rencana kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja. Dibandingkan tahun 2018 (60,46), Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Komnas HAM meningkat menjadi 95,10.

Sumber : Aplikasi SMART DJA



Gambar 9.Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Komnas HAM Tahun 2019

Sumber : Aplikasi SMART DJA



Gambar 10. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Komnas HAM Tahun 2015-2019

Terlepas dari hal tersebut, berdasarkan pada pelaksanaan monev tahun 2019 ditemukan beberapa hal yang menjadi perhatian, diantaranya:

1. Indikator Sasaran Strategis masih bersifat output;
2. Pelaksanaan kegiatan masih bersifat rutinitas;
3. Belum adanya bisnis proses Komnas HAM;
4. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja belum dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan; dan
5. Sistem kontrol manajemen atas capaian kinerja belum terbangun, dan tahapan perencanaan belum tersusun dengan baik.

Beberapa hal diatas merupakan temuan dalam pelaksanaan monev secara berkala dan harus segera dilakukan tindaklanjut untuk perbaikan, berikut beberapa rekomendasi dari temuan diatas:

1. Penting dilakukan reviu atas indikator kinerja, untuk memastikan kesesuaian dengan Visi, Misi, dan Tujuan Lembaga;
2. Menyusun prioritas perencanaan kinerja setiap tahunnya, untuk megidentifikasi kebutuhan sumber daya;
3. Meningkatkan integrasi unit kerja guna mendukung capaian Visi Misi Lembaga;
4. Menjadikan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; dan
5. Peningkatan pemahaman substansi HAM, siklus perencanaan dan monev serta pengawasan pada level manajemen agar kinerja dapat terukur serta dapat mengidentifikasi permasalahan.

Selain 3 (tiga) dokumen akuntabilitas kinerja tersebut diatas, Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal juga menyelenggarakan **Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)** untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat atas layanan Komnas HAM serta untuk mengukur Indeks Persepsi Anti Korupsi. Pelaksanaan kegiatan SKM didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 (Permenpan RB No.14/2017) tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 17 Tahun 2017 (Permenpan RB No.17/2017) tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Metodologi dalam SKM ini dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu metodologi pengumpulan data dan metodologi analisis data. Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuesioner secara langsung oleh pengguna layanan Komnas HAM didampingi tim evaluasi pelaporan.

Hasil survei SKM ini dianalisis dengan menggunakan beberapa metode analisis, yaitu:

a) Analisis tabulasi silang (cross- tab analysis) adalah tabel yang menggambarkan hubungan dua atau lebih variable
b) Analisis kesenjangan (gap analysis) adalah analisis mengenai kesenjangan antara harapan pengguna layanan dengan kinerja pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan yang bersangkutan , dan Imptance and Performance Analysis (IPA) adalah mengukur hubungan antara persepsi konsumen dengan prioritas peningkatan kualitas produk/jasa (Brandt, 2000 dan Latu, 2000).

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Komnas HAM pada tahun 2019 secara nasional adalah sebesar 8,29 dalam skala pengukuran 10. Jika dikonversi ke dalam skala pengukuran 100, maka didapat angka 82,9. Merujuk pada Permenpan RB No.14/2017 terdapat kolom yang berisikan Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan. Dijelaskan dalam kolom bahwa predikat kinerja unit pelayanan terbagi menjadi 4 (empat), mulai dari yang paling rendah yaitu 'Tidak Baik' yang disimbolkan dengan nilai D atau rentang Nilai Interval Konversi 25,00 – 64,99, predikat 'Kurang Baik' dengan rentang Nilai Interval Konversi 65,00 – 76,70, predikat 'Baik' dengan rentang Nilai Interval Konversi 76,61 – 88,30, hingga predikat paling tinggi yaitu 'Sangat Baik' yang disimbolkan dengan nilai A dengan rentang Nilai Interval Konversi 88,31 – 100,00. Oleh karena itu dapat disimpulkan **Pelayanan Komnas HAM secara nasional masuk ke dalam kategori "Baik"**. Hal ini adalah sebuah pencapaian yang baik sehingga harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk ke depannya.

Nilai Indeks Presepsi Anti Korupsi Komnas HAM secara nasional mencapai angka 9,35 pada skala penghitungan 10 dan jika dikonversi ke dalam skala penghitungan 100 maka didapatkan hasil 93,5. Hal ini harus dipertahankan dikarenakan angka ini sudah dapat dikategorikan bahwa **perilaku anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan di seluruh wilayah pelayanan Komnas HAM**, baik di Kantor Pusat Jakarta maupun di 4 (empat) kantor

perwakilan yang menjadi lokasi pengambilan data survei kepuasan masyarakat tahun 2019. Hal ini harus dipertahankan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas layanan yang bersih dan jauh dari segala bentuk korupsi oleh Komnas HAM kepada masyarakat.

Layanan Audit Internal yang tepat waktu. Dengan menjalankan fungsi audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan dapat mendorong akuntabilitas kinerja pegawai dan pengelolaan keuangan. Tahun 2019, Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal menghasilkan **25 Laporan Pengawasan Internal** yang terdiri dari :

Tabel 7. Laporan Pengawasan Internal tahun 2019

No	Rekomendasi yang dihasilkan
1	**Laporan Hasil Reviu atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara** dalam reviu ini terdapat beberapa temuan yang menghasilkan rekomendasi koreksi pada form pendataan dan perubahan balik nama terhadap 23 NUP sertifikat
2	**Laporan atas Pendampingan Sensus BMN** yang menghasilkan rekomendasi untuk Biro Umum khususnya Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga agar melakukan sensus BMN per Semester dan Triwulan III
3	**Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas SPIP** menghasilkan beberapa rekomendasi yaitu untuk melakukan evaluasi berkala atas efektifitas kebijakan, memastikan bahwa SPIP berjalan efektif, melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai, mewajibkan para Kepala Biro di Komnas Ham untuk melaporkan penyelenggaraan SPIP sebagai bagian penting bagi reviu pimpinan tingkat Lembaga, dll
4	**Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja (LKIP) Komnas HAM Tahun 2018** dari laporan ini ada beberapa catatan yang didapat yaitu laporan kinerja belum memuat capaian IKU, terdapat perbedaan rumusan IKU dengan PK, laporan kinerja masih berbentuk laporan kegiatan/belum menggambarkan laporan kinerja, sebagian indikator belum membandingkan antara target dengan realisasi dan belum membandingkan dengan capaian tahun lalu, laporan kinerja belum menampilkan kesimpulan umum atas capaian kinerja dan langkah mendatang untuk meningkatkan kinerja organisasi dan laporan kinerja belum menampilkan akuntabilitas keuangan se-Komnas HAM beserta analisis capaiannya
5	**Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan TA 2018** dalam reviu ini terdapat beberapa temuan yang menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya membuat jurnal koreksi berdasarkan kesepakatan dan jurnal take out berdasarkan Nota Kesepakatan Koreksi Pencatatan Hasil Penilaian kembali BMN Tahun 2017-2018 pada Laporan Keuangan Komnas HAM dengan Nomor: NK-074/17/TO-REVALBMN/2019
6	**Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2019** dalam reviu ini terdapat beberapa temuan yang menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya setiap Kantor Perwakilan harus melaporkan data persediaan ke Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga kantor pusat setiap bulan, berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait pencatatan pemisahaan gedung dan bangunan menjadi peralatan mesin dan nilai revaluasi gedung &

	bangunan serta pencatatan pemisahan aset dan nilai revaluasi, segera melakukan penghapusan untuk aset lain-lain yang berada dalam kondisi rusak dan tidak digunakan operasional
7	**Laporan Hasil Reviu Lapoaran Keuangan Triwulan III** dalam reviu ini terdapat beberapa temuan yang menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya setiap Kantor Perwakilan harus melaporkan data persediaan ke Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga kantor pusat setiap bulan, melakukan register ke DJPPR dan melakukan pengesahan ke KPPN, segera berkonsultasi dengan Direktorat APK dan Ditjen Kekayaan Negara terkait kebijakan akuntansi dan pencatatan gedung bangunan dan peralatan dan mesin
8	**Laporan Hasil Audit Belanja Mobil Sewa Komnas HAM TA 2019** dalam audit ini terdapat beberapa temuan yang menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya PPK dan Pejabat penerima hasil pekerjaan memeriksa kembali berkas sebelum diajukan pembayaran ke pihak ke 3 sehingga tidak ada lagi kekeliruan dan kesalahan
9	**Laporan Hasil Audit Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat tahun 2019** dalam audit ini terdapat beberapa temuan yang menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya Mengintruksikan petugas pengelola persediaan Komnas HAM perwakilan Kalimantan Barat untuk lebih tertib dalam melaksanakan penatausahaan barang persediaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya serta melaporankan barang persediaan secara berkala ke Biro Umum Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, menginstruksikan petugas BMN agar lebih cermat dalam melakukan penatausahaan BMN dan pengamanan aset, PK melakukan pemeriksaan kas BPP setiap bulan
10	**Laporan Hasil Audit Komnas HAM Perwakilan Aceh tahun 2019** dalam audit ini terdapat beberapa temuan yang menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh agar berkoordinasi dengan Biro Umum Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga terkait pelabelan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) atas barang hasil pengadaan tahun 2018 dan 2019, mengajukan penghapusan BMN kondisi rusak berat ke Biro Umum Perlengkapan dan Rumah Tangga, menindaklanjuti rekomendasi PI pada LHA November 2017 dengan memerintahkan BPP untuk lebih teliti dalam melakukan pengelolaan kas, dengan memisahkan antara keperluan pribadi dengan keperluan kantor
11	**Laporan Hasil Audit Komnas HAM Perwakilan Papua tahun 2019** dalam audit ini terdapat beberapa temuan yang menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya mengintruksikan kepada pelaksana kegiatan untuk memedomi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, menyetorkan atas kelebihan pembayaran belanja air bersih kepada kas negara, Membuat laporan BMN yang sudah dilakukan pemutakhiran data secara berkala terkait pengelolaan BMN, berkoordinasi dengan pengelola BMN pusat terkait pelabelan NUP BMN dan penghapusan BMN yang kondisinya rsudah rusak berat
12	**Laporan Hasil Audit Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat tahun 2019** dalam audit ini terdapat beberapa temuan yang menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya PPK Perwakilan Sumatera Barat dan pelaksana kegiatan untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan, Melakukan optimalisasi kebijakan pengelolaan persedian mulai dari perencanaan,

	pengadaan, pemakaian, penyimpanan, pencatatan serta pelaporan, Sub Bagian Perlengkapan dan Inventarisasi pada Komnas HAM Pusat melakukan sosialisasi pengelolaan persedian ke seluruh pelaksana kegiatan dan seluruh kantor perwakilan Komnas HAM didaerah termasuk didalam hal ini Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat, dalam pengelolaan persediaan dimana setiap ada persediaan dan mutasi persediaan untuk dilakukan pelaporan secara berkala kepada Sub Bagian Perlengkapan dan Inventarisasi Komnas HAM Pusat
13	**Laporan Reviu RKBMN** dalam reviu ini menghasilkan rekomendasi bahwa dalam melakukan rencana kebutuhan BMN Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus membuat penelitian RKBMN
14	**Laporan Reviu PA TW I 2019** dalam reviu ini terdapat catatan supaya lebih mempercepat pelaksanaan pengadaan belanja modal sebagaimana yang telah direncanakan dan memperbaiki perencanaan terkait ketidakcermatan dan kesalahan mata anggaran
15	**Laporan Reviu PA TW II 2019** dalam reviu ini terdapat catatan supaya lebih mendorong percepatan penyelesaian realisasi kegiatan dan pekerjaan fisik pengadaan barang/jasa dan mendorong manajemen untuk membangun sistem pemantauan pengadaan barang/jasa secara realtime
16	**Laporan Reviu PA TW III 2019** dalam reviu ini terdapat catatan supaya mendorong percepatan penyelesaian realisasi kegiatan dan pekerjaan fisik pengadaan barang/jasa dan mendorong manajemen untuk membangun sistem pemantauan pengadaan barang/jasa secara realtime
17	**Laporan Reviu PA TW IV 2018** dalam reviu ini terdapat catatan supaya lebih membangun sistem pemantauan pengadaan barang/jasa dan membangun sistem pemantauan kinerja secara realtime
18	**Laporan Pendampingan BPK TA 2018** dalam pendampingan BPK ini ada beberapa catatan diantaranya Komnas HAM telah menginventalisir persediaan obat-obatan yang telah kadaluarsa, pelaksanaan penghapusan obat dilaksanakan pada pertengahan semester I Tahun 2019 , Komnas HAM telah menerbitkan SK Nomor : 010/KEP.0.0.3/I/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang pembentukan tim pelaksana Inventarisasi, Sekretaris Jenderal Komnas HAM telah memerintahkan pendistribusian asset yang belum di manfaatkan
19	**Laporan Hasil Pengawasan PNBP Komnas HAM TA 2018** dalam pengawasan ini ada catatan dengan rekomendasi harus melakukan pengembalian kas ke negara terkait keterlambatan pekerjaan pemeliharaan gedung
20	**Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Komnas HAM TA 2018** dari evaluasi ini terdapat beberapa catatan terkait nilai hasil evaluasi bebrapa unit kerja yang menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya supaya Biro Renwaskes melakukan sosialisasi Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM No. 10 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Komnas HAM ke seluruh unit eselon II, menyusun dan menetapkan Renstra Eselon II, menyusun sasaran yang berorientasi hasil dan indikator yang memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik/SMART, menyusun dan menetapkan IKU unit eselon II, menggunakan Teknologi Informasi untuk pengukuran kinerja, memanfaatkan hasil pengukuran (capaian) kinerja sebagai pemberian reward dan punishment, menyusun laporan kinerja yang menyajikan informasi pencapaian IKU dan kinerja lain yang telah diperjanjikan, menyusun

	laporan kinerja yang menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan serta menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, memanfaatkan informasi yang disajikan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan unit organisasi, peningkatan dan penilaian kinerja, melakukan pemantauan dan evaluasi rencana aksi atas kinerja yang telah ditetapkan secara berkala dan tepat waktu
21	**Laporan Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Semester I TA 2019** dalam laporan ini ada beberapa catatan diantaranya Biro Umum melalui Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga serta Komnas Perempuan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK Tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya, dalam hal kerugian negara yang belum disetorkan ke kas negara dan yang melibatkan pihak ketiga, Kepala ULP dan TPKN akan berkoordinasi dengan PPK dan Pejabat Pengadaan terkait
22	**Laporan Hasil Reviu Penambahan Anggaran (Top Up) Belanja Pegawai Komnas HAM TA 2019** dari reviu ini ada catatan bahwa tidak ada hal-hal yang membuat yakin bahwa usulan Penambahan Anggaran (Top-Up) Belanja Pegawai Komnas HAM tidak sesuai dengan PMK No 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2019
23	**Laporan Reviu RKAKL** dari reviu ini terdapat beberapa rekomendasi diantaranya dari segi kelayakan RKA belum sepenuhnya memenuhi aspek kelayakan anggaran untuk menghasilkan output, dari segi kepatuhan belum memenuhi kaidah-kaidah penganggaran, dari segi kelengkapan dokumen pendukung masih belum lengkap, biaya pemeliharaan gedung dan bangunan dalam RKA belum memperhatikan data gedung existing
24	**Laporan IACM** dalam laporan ini ada beberapa catatan diantaranya untuk membuat *audit universe*, membuat PKPT, membuat prosedur pengawasan, membuat program kerja audit, membuat kertas kerja audit
25	**Laporan Audit Langganan Jasa** dalam audit ini terdapat kesimpulan bahwa Pengadaaan Belanja untuk service charger dan belanja listrik Hayam Wuruk telah sesuai denagn ketentuan

Disamping menghasilkan 25 Laporan Pengawasan Internal, keberhasilan lain yang dihasilkan pada 2019 adalah **Tingkat maturitas SPIP meningkat**. Menurut penilaian dan pengujian bukti oleh BPKP sebagai Tim QA adalah 3,113 (terdefinisi) melalui berita acara hasil *Quality Assurance* (QA). Dan nilai inilah yang menjadi tingkat maturitas SPIP Komnas HAM. Meningkatnya nilai maturitas SPIP menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan di Komnas HAM. Namun demikian tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP juga merupakan sarana untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan SPIP.

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Bagian Kerja sama, Persidangan dan TU Pimpinan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Terselenggaranya hubungan masyarakat dan informasi	Persentase opini negatif pemberitaan K/L pada media	100 Persen	100 Persen
2.	Terselenggaranya layanan protokoler	Indeks ketepatan waktu persiapan pelayanan keprotokoleran pimpinan	1 Layanan	1 Layanan

Persentase Opini Negatif Pemberitaan K/L pada media. Peran humas dalam membuat pemberitaan, termasuk konferensi pers, diskusi media, keterangan pers dan sebagainya membawa pengaruh terhadap citra lembaga. Pemberitaan-pemberitaan tentang Komnas HAM mampu menunjukkan kinerja Komnas HAM yang antara lain ditunjukkan dalam bentuk rekomendasi, pemberian tanggapan, hasil kajian terhadap kebijakan pemerintah, kondisi dan perkembangan HAM di Indonesia maupun isu aktual yang sedang berkembang belakangan ini. Pembuatan berita juga dapat memberi informasi kepada publik tentang kinerja dan tugas/fungsi Komnas HAM.

Selama kurun waktu April hingga Desember 2019, humas mencatat terkait pemeberiataan Komnas HAM dengan rincian sebagai berikut: 25 konferensi pers, diskusi media sebanyak 12 kali, terdapat 20 undangan peliputan media dan menerbitkan sebanyak 31 keterangan pers baik berupa pers release maupun materi informasi Komnas HAM untuk disebarluaskan ke media massa

Tabel 9. Kegiatan Konferensi Pers dan Diskusi Media Komnas HAM 2019

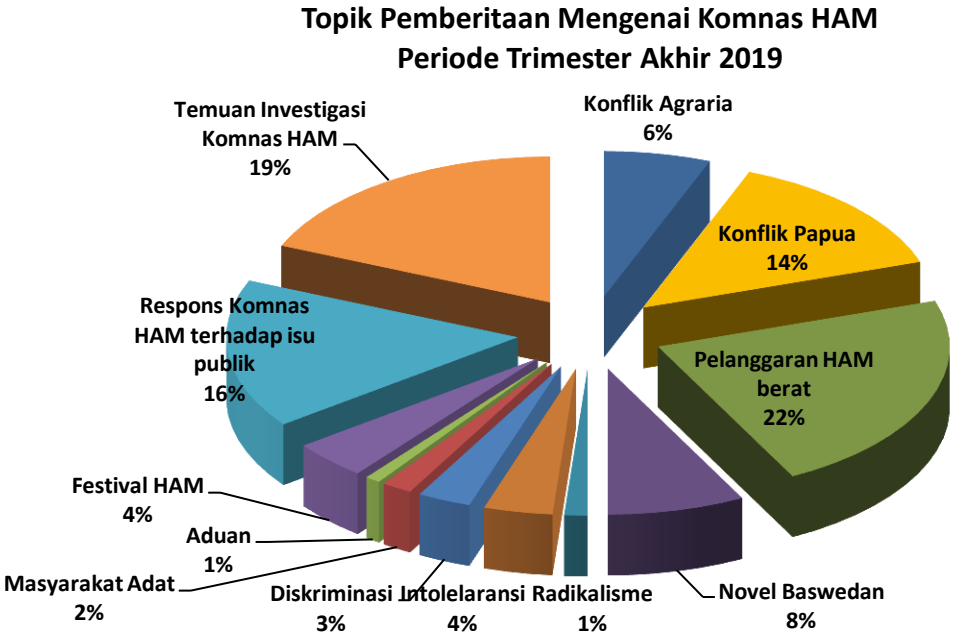
NO	KONFERENSI PERS	DISKUSI MEDIA
1	Konferensi Pers penandatanganan Perjanjian Kerja sama Upaya Pengawasan dan Pencegahan Penyiksaan antara Ditjen Imigrasi dengan lima lembaga negara (Komnas HAM, ORI, KPAI, dan LPSK)	Penyelesaian Konflik Pertanahan dalam Perspektif HAM
2	Penyikapan atas Meninggalnya Ratusan Petugas Penyelenggara Pemilu 2019	Bincang Komnas HAM dengan Jurnalis Tentang Situasi Terkini
3	Hasil Pemantauan Komnas HAM terhadap Banyaknya Petugas KPPS Pemilu 2019 yang Meninggal	HAM dan Kebudayaan : Mencari Ruang Bertemu
4	Stop penyiksaan di tempat pencerabutan kebebasan	Masa Depan Demokrasi dan HAM di Indonesia
5	Komnas HAM dan UNHCR melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama 2019-2022 tentang Perlindungan untuk Pengungsi, Pencari Suaka, dan Orang-Orang Tanpa Berkewarganegaraan	Sudahkah Wong Cilik Merdeka

6	Respons Komnas HAM terkait DPR RI yang sedang berupaya menyelesaikan pembahasan RUU Penyadapan. Secara prinsip penyadapan merupakan pelanggaran HAM yang diatur dalam instrumen HAM seperti UNDH, ICCPR, UUD 1945 dan UU No 39/1999 tentang HAM	Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang akan disahkan dalam waktu dekat oleh DPR RI
7	Tipologi Kasus-Kasus Dugaan Pelanggaran HAM di Indonesia dalam Januari-April 2019	20 Tahun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia: Refleksi Dan Proyeksi
8	Penandatanganan Nota Kesepahaman Penyelenggaraan Festival HAM 2019	Perkembangan HAM Yang Pemenuhannya Masih Tugas Kita Bersama
9	Peluncuran Laptah 2019 Komnas HAM	Pendidikan Inklusi di Sekolah: Kebijakan dan Implementasinya
10	Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Pembentukan Komando Operasi Khusus TNI	Penyelesaian Konflik Pertanahan yang Ramah HAM" sebagai salah satu rangkaian acara peringatan Hari HAM 2019.
11	Sikap Komnas HAM atas Sengketa Lahan Antara TNI AL dengan Warga di Pasuruan	Refleksi Implementasi Fungsi Mediasi di Indonesia: 20 tahun Fungsi mediasi oleh Komnas HAM RI
12	Berbincang tentang Rancangan Undang-Undang KUHP dengan Komnas HAM	Diskusi HAM dan Media Massa
13	Kajian RKUHP	
14	Sikap Komnas HAM terhadap situasi pasca unjuk rasa mahasiswa dan pelajar di gedung DPR	
15	Tragedi kemanusian Papua	
16	Pembahasan Tragedi Kemanusiaan Wamena dan Papua	
17	Tim Pencari Fakta Peristiwa 21-23 Mei 2019 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI akan menyampaikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasinya	
18	Peluncuran Buku Laporan Pemilu 2019 : Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara	
19	Konsultasi Nasional Infrastruktur	
20	Jumpa Pers FESTIVAL HAM NOVEMBER 2019	
21	Isu HAM untuk Pemerintah Presiden Jokowi Periode Kedua	
22	Percepatan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Konflik Agraria dan Persoalan Diskriminasi, Intoleransi	
23	Survei Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu Pada Era Kepemimpinan Joko Widodo	
24	Launching Survei “Refleksi 20 Tahun Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”	
25	Kedatangan Wapres RI Ma'ruf Amin dalam Rangka Pembukaan Rangkaian Hari HAM 2019	

Berdasarkan hasil monitoring pada periode sampling akhir tahun yaitu pada trimester akhir Tahun 2019 pada Bulan Oktober, November, Desember, Humas Komnas HAM telah memonitor pemberitaan media online baik nasional maupun lokal mengenai mengenai Komnas HAM sebanyak 266 berita. Terdapat setidaknya 10 media online skala nasional yang kerap memberitakan Komnas HAM yaitu: Detik.com, Tempo.com, Kompas.com, Kumparan, Tirto.id, Gatra.com, CNNIndonesia.com, Tribunnews.com, Antaranews, dan Medcom.id. Kesepuluh media online tersebut secara rutin paling sering melakukan peliputan mengenai Komnas HAM baik yang bersifat peliputan on the spot maupun wawancara melalui telepon.



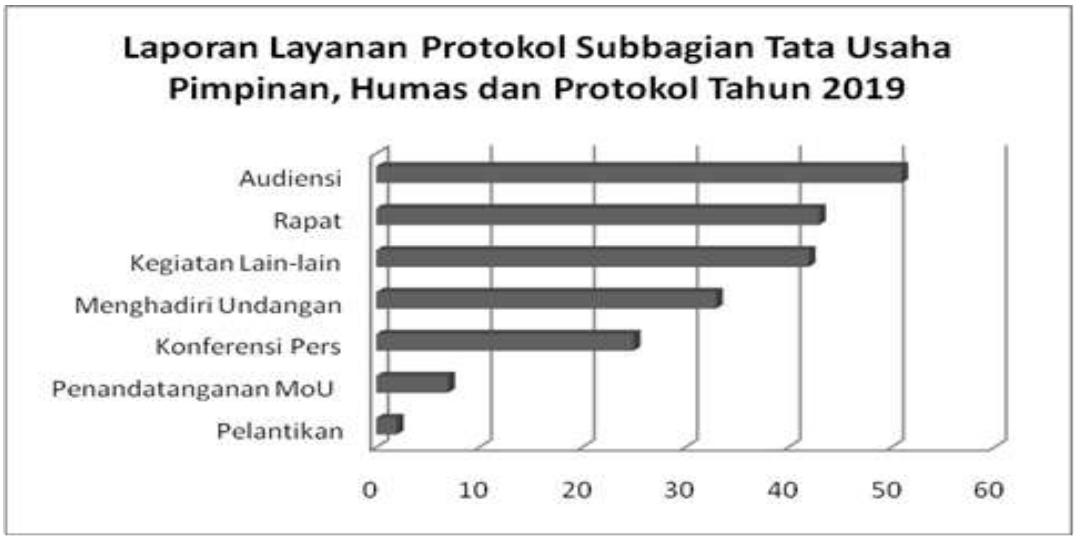
Gambar 11. Ketua Komnas HAM memberikan keterangan pers



Periode 3 (tiga) bulan akhir pemberitaan portal media online mengenai Komnas HAM didominasi bahasan mengenai pelanggaran HAM berat sebesar 22%, temuan investigasi Komnas HAM sebesar 19%, respons Komnas HAM terhadap isu publik yang hangat dibicarakan di masyarakat sebesar 16 %, dan konflik Papua sebesar 14 %.Jika dilihat dari

matriks media monitoring bulanan dilakukan Humas Komnas HAM, topik mengenai pelanggaran HAM berat selalu ada dalam pemberitaan media online. Hal ini dapat diartikan bahwa isu ini merupakan bahasan yang paling memiliki keterkaitan dengan Komnas HAM dan media massa menaruh perhatian terhadap hal ini. Berdasarkan data pemberitaan dalam periode sampling bulan Oktober 2019, pemberitaan terbanyak terjadi pada kurun waktu 28-29 Oktober 2019 atau dalam 2 hari tercatat sebanyak 40 berita dengan topik mengenai Peristiwa 21-23 Mei 2019 sehubungan dengan konferensi pers Komnas HAM mengenai Peluncu ran Laporan Tim Pencari Fakta Peristiwa 21-23 Mei 2019 yang digelar pada tanggal 28 Oktober di Kantor Komnas HAM. Selain itu seperti pemberitaan pada periode sampling November 2019, Komnas HAM mendapat ekspos pemberitaan dalam sehari sebanyak 5 pemberitaan pada tanggal 25 November 2019 terkait kebijakan penuntasan pelanggaran HAM berat oleh pemerintahan baru Presiden Jokowi dalam hal ini Menkopolhukam Mahfud MD melalui mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Hal ini sehubungan dengan pada tanggal 25 November 2019 Komnas HAM bertemu dengan Menkopolhukam Mahfud MD.

Indeks Ketepatan Waktu persiapan pelayanan keprotokoleran pimpinan. Untuk memastikan kelancaran kegiatan-kegiatan yang di hadiri oleh Pimpinan dan Komisioner Komnas HAM menjadi tugas penting yang dilaksanakan oleh protokol. Sepanjang tahun 2019 Layanan Keprotokoleran telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendampingan sebanyak 135 kegiatan yang terdiri dari :



Berdasarkan diagram di atas, maka layanan keprotokoleran yang menduduki peringkat tertinggi adalah audiensi 50 kegiatan dimana protokoler bertugas mengatur tata letak, kelengkapan alat, menyambut tamu, dan bersiaga sampai kegiatan audiensi berakhir. Rapat – rapat 43 kegiatan, baik kegiatan rapat rutin di Komnas HAM maupun mendampingi pimpinan mengikuti rapat di luar Komnas HAM. Untuk kegiatan lain – lain 42 kegiatan, terdiri dari kegiatan penerimaan pengaduan yang memerlukan kehadiran pimpinan dan/atau

komisioner untuk menerima pengaduan. Pelayanan protokol yang tepat waktu merupakan pelayanan yang diperlukan oleh lembaga. Adapun indeks pelayanan protokol yang tepat waktu di Komnas HAM pada 2019 berada pada **nilai 3 (cukup)**.

Indeks Tepat Waktu/Disiplin Protokol2019



Dengan adanya pelayanan protokol yang tepat waktu, kegiatan lembaga yang menyangkut antara lain dengan kelancaran aktifitas pimpinan dan anggota Komnas HAM dapat terlaksana dengan lebih terencana dan tepat waktu. Disamping itu protokol berperan penting memastikan terjadinya komunikasi dan koordinasi yang baik. Pelayanan protokol memegang peran penting dalam memastikan pimpinan dan anggota Komnas HAM dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya.

Penyelenggaraan Sidang Paripurna. Pada tahun 2019, Sidang Paripurna yang seharusnya dilaksanakan sebanyak 12 kali, dilaksanakan sebanyak 15 kali. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa isu yang dianggap penting sehingga pelaksanaan dilaksanakan 2 kali pada bulan April, November dan Desember 2019. Jumlah pelaksanaan sidang paripurna pada tahun 2019 dilaksanakan sebanyak 15 kali dan menghasilkan 265 keputusan. Sedangkan rapat koordinasi dilaksanakan sebanyak 12 kali pada tahun 2019 dan menghasilkan 140 keputusan. Kemudian rapat pimpinan dilaksanakan sebanyak 12 kali pada tahun 2019 dan menghasilkan 216 keputusan.



Gambar 12. Penyelenggaraan Sidang dan Rapat

Kerja sama Dalam dan Luar Negeri. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi-fungsi Komnas HAM, Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama bertugas untuk melaksanakan fungsi administrasi kerja sama. Sepanjang tahun 2019, perjanjian kerja sama yang dihasilkan adalah sebanyak 9 (sembilan) kerja sama dalam negeri dan 4 (empat) kerja sama luar negeri.



Gambar 13. Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Universitas Syiah Kuala, Aceh

Implementasi kerja sama dalam negeri yang telah dilaksanakan terdapat **empat (4) kerja sama dalam negeri yang mendukung fungsi pengkajian dan penelitian serta penyuluhan** yaitu Perjanjian Kerja Sama antara 5 Lembaga (Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, ORI dan LPSK) dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Perjanjian Kerja Sama antara 5 Lembaga (Komnas HAM, Komnas perempuan, KPAI, ORI dan LPSK) dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Lapas Paledang, Rutan Pondok Bambu, dan Rutan Salemba tahun 2019. Perjanjian kerja sama ini sudah dilaksanakan tindak lanjutnya antara lain dengan adanya kegiatan lokalatih keterampilan teknis pemantauan tempat-tempat penahanan, yang termasuk di dalamnya yaitu praktik dengan melakukan kunjungan ke LAPAS Paledang, Rutan Pondok Bambu dan Rutan Salemba. Lebih jauh, telah dilakukan uji coba panduan pemantauan ke Lapas Gunung Sindur, Lapas Cibinong, dan Rutan Depok. Selain kedua ini terdapat Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan Universitas Syiah Kuala dan Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.

Ada **lima (5) kerja sama dalam negeri yang mendukung fungsi penyuluhan** yaitu Nota Kesepahaman antara Komnas HAM, KSP, Pemkab Jember; Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM dengan Pemerintah Kota Banjarmasin; Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan Universitas Katholik Parahyangan; Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM dengan Pemerintah Kota Banjarmasin dan Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM dan FISIP Universitas Negeri Sebelas Maret yang mendukung Komnas HAM untuk berjejaring dengan mitra universitas.



Gambar 14. Ketua Komnas HAM sebagai pembicara pada Konfererensi Internasional Ke-III tentang Perlindungan HAM di Eurasia, Moskow, Rusia

Kerja sama luar negeri yang mendukung penyuluhan ada satu (1) yaitu The Danish Institute of Human Rights (DIHR) terkait isu Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah ditindaklanjuti dengan beberapa kegiatan pada tahun 2019 diantaranya berkolaborasi menyelenggarakan Side event mengenai *Empowering the Most Marginalized and Ensuring Inclusiveness and Equality: Realizing the SDGs through Human Rights*, Bangkok, 29 Maret 2019, menggelar pelatihan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang mengusung tema "SDGs and Human Rights Workshop", Komnas HAM, 4-5 September 2019. Selain itu, DIHR juga menjajaki kerja sama dengan tema kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dengan mengadakan kunjungan bersama The Danish FoRB ambassador (Michael Suhr) ke Komnas HAM, September 2019. **Ada dua (2) kerja sama luar negeri yang mendukung fungsi pemantauan** yaitu Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM dengan Provedoria Dos Direitos Humanos E Justica Timor Leste (PDHJ) dan Memorandum of Understanding between the Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM) The National Commission on Human Rights of Indonesia (Komnas HAM), and Commission of Human Rights Phillipines (CHRP) as an observers. Perjanjian ini terkait dengan isu orang-orang tanpa kewarganegaraan (statelessness).

Memorandum of Understanding between The National Human Rights Commission (KOMNAS HAM) of the Republic of Indonesia and the Office of The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Improving Human Rights Protection for Refugees, Asylum Seekers, and Stateless Persons in Indonesia yang terkait perlindungan terhadap pengungsi, pencari suaka dan orang-orang tak berkewarganegaraan namun dalam 2019 belum terlaksana tindak lanjutnya.

Selain kerja sama yang dituangkan dalam naskah kerja sama, Komnas HAM juga melakukan kerja sama kelembagaan dalam bentuk keanggotaan di tingkat wilayah yaitu Asia Tenggara, Asia Pasifik dan tingkat dunia. Komnas HAM menjadi salah satu anggota dari *The South East Asia National Human Rights Institutions Forum* (SEANF). Pada 2019, keketuaan SEANF dipegang oleh Timor Leste (PDHJ), keketuaan tersebut diserahkan terimakan kepada Komnas HAM pada Oktober 2019, selanjutnya Komnas HAM menjadi Ketua SEANF 2019-2020.

Komnas HAM juga menjadi anggota dari Asia Pacific Forum (APF) dan Global Alliance of Human Rights National Institutions (GANHRI). Baik APF maupun GANHRI merupakan perkumpulan ataupun wadah bagi institusi HAM nasional yang ada di Asia Pasifik (APF)

maupun di tingkat dunia (GANHRI). Komnas HAM dapat melakukan konsultasi maupun pembaruan informasi terkait perkembangan isu hak asasi manusia di dalam wadah ini. Di dalam APF, Komnas HAM mendapat dukungan, antara lain pengembangan kapasitas dan bantuan teknis untuk kelembagaan Komnas HAM. Sementara itu, di dalam GANHRI, Komnas HAM dapat melakukan pertemuan-pertemuan antar institusi nasional untuk membahas isu-isu utama hak asasi manusia. GANHRI menjadi fasilitator untuk berkoordinasi dengan PBB, khususnya Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR).

PENGANGGARAN

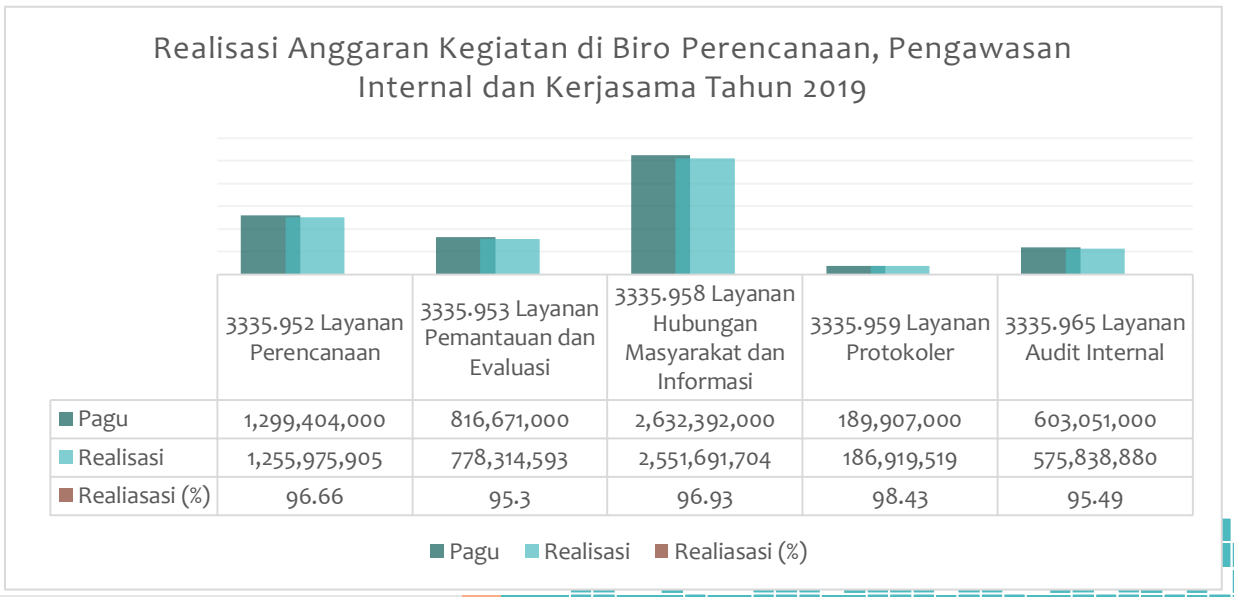
Tahun 2019 Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama mengelola anggaran sebesar **Rp. 5.541.425.000,- terdiri dari APBN dan Hibah**. Rincian anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 10. Pagu Anggaran 2019 Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama

Sumber Anggaran	Pagu	Realisasi	Realisasi (%)
APBN	5.314.735.000	5.217.595.400	9817%
Hibah	226.690.000	211.101.867	93.12%
Total	**5.541.425.000**	**5.428.697.267**	**95.64%**

Tabel 11. Realisasi Anggaran 2019 Per Output

Output	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)
3335.952 Layanan Perencanaan	1.299.404.000	1.255.975.905	96.66 %
3335.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	816.671.000	778.314.593	95.30 %
3335.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2.632.392.000	2.551.691.704	96.93 %
3335.959 Layanan Protokoler	189.907.000	186.919.519	98.43 %
3335.965 Layanan Audit Internal	603.051.000	575.838.880	95.49 %
Total	**5.541.425.000**	**5.348.740.601**	**96.56 %**



BAGIAN IV
PENUTUP

BIRO PERENCANAAN,
PENGAWASAN INTERNAL DAN
KERJASAMA

PENUTUP

PERBAIKAN BERKESINAMBUNGAN

Secara umum kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama tercapai **100 persen sesuai target yang telah direncanakan**. Bila dibandingkan dengan tahun 2018, hasil evaluasi menunjukkan peningkatan sebesar 2 point dari 60,19 menjadi 62,19. Meski meningkat, nilai akuntabilitas yang dihasilkan masih pada tingkat kategori rendah.



Gambar 15. Arti Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Diperlukan langkah-langkah yang lebih strategis dalam rangka perbaikan yang berkesinambungan guna meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja, antara lain :

a. Renstra Komnas HAM tahun 2020- 2024 harus menyajikan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART
b. Perjanjian Kinerja (PK) yang dijadikan dasar pemberian *reward and punishment.*
c. Mengoptimalkan *e-perfomance* sebagai media monitoring dan evaluasi, serta mengintegrasikan system perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja agar mempercepat penerapan *performance based budgeting.*
d. Pimpinan unit kerja agar memanfaatkan laporan kinerja sebagai *feedback* dalam perbaikan yang akan datang.

LAMPIRAN

BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
2. PROGRAM : 01 - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terselenggaranya dukungan dibidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM
4. KEGIATAN : 3335 - Peningkatan Kualitas Perencananaan, Pengawasan dan Kerjasama
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Pengawasan Internal
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Komnas HAM		5.419.212,00
01.01	Nilai akuntabilitas kinerja Komnas HAM	1	
Total			5.419.212,00

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Komnas HAM*											5.419.212,00
01.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I								000 - Bukan Tematik		tidak	0,00
01.952	Layanan Perencanaan								000 - Bukan Tematik		tidak	1.392.878,00
01.952.001	Tanpa Sub Output											1.392.878,00
	051 - Penyusunan rencana kerja											1.392.878,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									1.392.878,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi								000 - Bukan Tematik		tidak	881.460,00
01.953.001	Tanpa Sub Output											881.460,00
	051 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi											676.450,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									676.450,00
	070 - Penyusunan laporan											205.010,00
		Pusat	Pusat									205.010,00
01.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi								000 - Bukan Tematik		tidak	2.307.733,00
01.958.001	Tanpa Sub Output											2.307.733,00
	051 - Hubungan masyarakat											1.250.000,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									1.250.000,00
	052 - Kampanye/edukasi publik											387.940,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									387.940,00
	053 - Penyusunan laporan											669.793,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									669.793,00
01.959	Layanan Protokoler								000 - Bukan Tematik		tidak	194.467,00
01.959.001	Tanpa sub output											194.467,00
	052 - Pelaksanaan keprotokoleran											194.467,00
		Pusat	Pusat									194.467,00
01.965	Layanan Audit Internal								000 - Bukan Tematik		tidak	642.674,00
01.965.001	Tanpa Sub Otput											642.674,00
	051 - Pelaksanaan audit internal											308.560,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									308.560,00
	054 - Tindak lanjut hasil Laporan Hasil Pemeriksaan LHP											90.375,00
		Pusat	Pusat									90.375,00
	055 - Reviu perencanaan anggaran											185.508,00
		Pusat	Pusat									185.508,00
	056 - Pembinaan pengawasan Kinerja dan keuangan											58.231,00
		Pusat	Pusat									58.231,00
Total												5.419.212,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Komnas HAM				5.419.212,00				5.830.374,00	6.219.099,00	6.685.579,00
01.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	Layanan		0,00				0,00	0,00	0,00
01.952	Layanan Perencanaan	1	Layanan		1.392.878,00				1.448.593,00	1.506.536,00	1.566.797,00
01.952.001	Tanpa Sub Output				1.392.878,00				1.448.593,00	1.506.536,00	1.566.797,00
01.952.001.051	Penyusunan rencana kerja	8,00	8 dokumen	174.109,75	1.392.878,00	8,00	8,00	8,00	1.448.593,00	1.506.536,00	1.566.797,00
01.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Layanan		881.460,00				1.013.999,00	1.054.558,00	1.096.739,00
01.953.001	Tanpa Sub Output				881.460,00				1.013.999,00	1.054.558,00	1.096.739,00
01.953.001.051	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	3,00	3 laporan	225.483,33	676.450,00	3,00	3,00	3,00	738.238,00	767.767,00	798.477,00
01.953.001.070	Penyusunan laporan	2,00	2 laporan	102.505,00	205.010,00	2,00	2,00	2,00	275.761,00	286.791,00	298.262,00
01.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan		2.307.733,00				2.386.075,00	2.481.518,00	2.580.777,00
01.958.001	Tanpa Sub Output				2.307.733,00				2.386.075,00	2.481.518,00	2.580.777,00
01.958.001.051	Hubungan masyarakat	12,00	12 dokumen kerjasama	104.166,67	1.250.000,00	12,00	12,00	12,00	1.300.000,00	1.352.000,00	1.406.080,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
01.958.001.052	Kampanye/edukasi publik	2,00	2 laporan	193.970,00	387.940,00	2,00	2,00	2,00	389.491,00	405.071,00	421.273,00
01.958.001.053	Penyusunan laporan	2,00	2 laporan	334.896,50	669.793,00	2,00	2,00	2,00	696.584,00	724.447,00	753.424,00
01.959	Layanan Protokoler	1	Layanan		194.467,00				202.245,00	210.334,00	218.747,00
01.959.001	Tanpa sub output				194.467,00				202.245,00	210.334,00	218.747,00
01.959.001.052	Pelaksanaan keprotokoleran	1,00	1 layanan	194.467,00	194.467,00	1,00	1,00	1,00	202.245,00	210.334,00	218.747,00
01.965	Layanan Audit Internal	1	Layanan		642.674,00				779.462,00	966.153,00	1.222.519,00
01.965.001	Tanpa Sub Otput				642.674,00				779.462,00	966.153,00	1.222.519,00
01.965.001.051	Pelaksanaan audit internal	0,00	dokumen	NaN	308.560,00	0,00	0,00	0,00	431.984,00	604.777,00	846.688,00
01.965.001.054	Tindak lanjut hasil Laporan Hasil Pemeriksaan LHP	0,00	laporan	NaN	90.375,00	0,00	0,00	0,00	93.990,00	97.749,00	101.659,00
01.965.001.055	Reviu perencanaan anggaran	0,00	laporan	NaN	185.508,00	0,00	0,00	0,00	192.928,00	200.645,00	208.671,00
01.965.001.056	Pembinaan pengawasan Kinerja dan keuangan	0,00	laporan	NaN	58.231,00	0,00	0,00	0,00	60.560,00	62.982,00	65.501,00
Total					5.419.212,00	-	-	-	5.830.374,00	6.219.099,00	6.685.579,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Komnas HAM		5.419.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419.212,00
01.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.952	Layanan Perencanaan		1.392.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.878,00
01.952.001	Tanpa Sub Output		1.392.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.878,00
01.952.001.051	Penyusunan rencana kerja	Pendukung	1.392.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.878,00
01.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		881.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.460,00
01.953.001	Tanpa Sub Output		881.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.460,00
01.953.001.051	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	Pendukung	676.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.450,00
01.953.001.070	Penyusunan laporan	Pendukung	205.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.010,00
01.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		2.307.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307.733,00
01.958.001	Tanpa Sub Output		2.307.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307.733,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01.958.001.051	Hubungan masyarakat	Pendukung	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
01.958.001.052	Kampanye/edukasi publik	Pendukung	387.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.940,00
01.958.001.053	Penyusunan laporan	Pendukung	669.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.793,00
01.959	Layanan Protokoler		194.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.467,00
01.959.001	Tanpa sub output		194.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.467,00
01.959.001.052	Pelaksanaan keprotokoleran	Pendukung	194.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.467,00
01.965	Layanan Audit Internal		642.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.674,00
01.965.001	Tanpa Sub Otput		642.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.674,00
01.965.001.051	Pelaksanaan audit internal	Pendukung	308.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.560,00
01.965.001.054	Tindak lanjut hasil Laporan Hasil Pemeriksaan LHP	Pendukung	90.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.375,00
01.965.001.055	Reviu perencanaan anggaran	Pendukung	185.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.508,00
01.965.001.056	Pembinaan pengawasan Kinerja dan keuangan	Pendukung	58.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.231,00
Total			5.419.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419.212,00

Jakarta, 04 Desember 2018
Sekretaris Jenderal

Dr. Tasdiyanto, SP., M.Si
NIP. 197207201996031001

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Esrom Hamonangan Panjaitan
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Tasdiyanto
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2019

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Tasdiyanto	**Esrom Hamonangan Panjaitan**

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Komnas HAM	1. Nilai akuntabilitas kinerja Komnas HAM	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
1. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama	Rp. 5.419.212.000,-

Jakarta, April 2019

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Tasdiyanto

Pimpinan Unit Kerja,

Esrom Hamonangan Panjaitan

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ria Fitriana
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Esrom Hamonangan Panjaitan
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2019

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Esrom Hamonangan Panjaitan	**Ria Fitriana**

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya layanan perencanaan	1. Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan tepat waktu	8 Dokumen
2	Terselenggaranya layanan pemantauan dan evaluasi	1. Nilai MENPAN atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	B Nilai
3	Terselenggaranya layanan audit internal	1. Layanan audit internal yang tepat waktu	1 Layanan

Output	Anggaran
1. Layanan Perencanaan	Rp. 1.392.878.000,-
2. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp. 881.460.000,-
3. Layanan Audit Internal	Rp. 642.674.000,-

Jakarta, April 2019

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Esrom Hamonangan Panjaitan

Pimpinan Unit Kerja,

Ria Fitriana

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sasanti Amisani
Jabatan : Kepala Bagian Kerjasama, Persidangan dan Tata Usaha Pimpinan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Esrom Hamonangan Panjaitan
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2019

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Esrom Hamonangan Panjaitan	**Sasanti Amisani**

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BAGIAN KERJASAMA, PERSIDANGAN DAN TATA USAHA PIMPINAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya hubungan masyarakat dan informasi	1. Persentase opini negatif pemberitaan K/L pada media	100 Persen
2	Terselenggaranya layanan protokoler	1. Indeks ketepatan waktu persiapan pelayanan keprotokoleran pimpinan	1 Layanan

Output	Anggaran
1. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp. 2.307.733.000,-
2. Layanan Protokoler	Rp. 194.467.000,-

Jakarta, April 2019

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Esrom Hamonangan Panjaitan

Pimpinan Unit Kerja,

Sasanti Amisani

BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA

2019